

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	xi
Intisari .....	xiv
Abstract .....	xvi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	28
C. Tujuan Penelitian .....	28
D. Definisi Operasional .....	28
E. Keaslian Penelitian .....	33
F. Kegunaan Penelitian .....	48
G. Metode Penelitian .....	48

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai <i>Ius Constituendum</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	59
B. Tinjauan Mengenai Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Jasa Keuangan .....	65
C. Tinjauan Mengenai <i>Peer to Peer Lending</i> dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .....	77
D. Tinjauan Mengenai Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen <i>Financial Technology</i> .....	91

## BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Teori dan Teori Hukum .....	99
B. Tinjauan Mengenai Teori Keadilan .....	102
C. Tinjauan Mengenai Konsep dan Pemikiran Perlindungan Hukum .....	112
D. Tinjauan Mengenai Teori Asimetri Informasi .....	119
E. Tinjauan Mengenai Teori Rasionalitas Terbatas .....	136

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Arti Penting Pengaturan Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan LPBBTI	
Guna Meningkatkan Pelindungan bagi Pemberi Dana.....	147
1. Arti Penting Pengaturan Berdasarkan Argumentasi Filosofis.....	147
2. Arti Penting Pengaturan Berdasarkan Argumentasi Yuridis.....	161
3. Arti Penting Pengaturan Berdasarkan Argumentasi Sosiologis ....	173
B. <i>Ius Constituendum</i> Pengaturan Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan LPBBTI Guna Meningkatkan Pelindungan bagi Pemberi Dana .....	233
1. <i>Ius Constitutum</i> Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan LPBBTI dan Kelemahannya.....	233
2. <i>Ius Constituendum</i> Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan LPBBTI Guna Meningkatkan Pelindungan bagi Pemberi Dana ...	247
a. Substansi Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> di Beberapa Negara.....	249
b. Perbandingan Substansi Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyele- Nggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> Antara Amerika Serikat, Inggris dan China.....	281
c. Persamaan dan Perbedaan Substansi Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> (LPBBTI) Antara Indonesia dengan Amerika Serikat.....	288
d. Persamaan dan Perbedaan Substansi Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> (LPBBTI) Antara Indonesia dengan Inggris.....	290
e. Persamaan dan Perbedaan Substansi Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> (LPBBTI) Antara Indonesia dan China .....	294
f. <i>Lesson Learned</i> Yang Diperoleh dari Substansi Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> di Beberapa Negara .....	296
g. Substansi Pengaturan Keterbukaan Informasi	

	Penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> di Amerika Serikat, Inggris dan China yang Dapat Diadopsi dan yang Dapat Diadaptasi ke Dalam Pengaturan LPBBTI di Indonesia.....	304
h.	Usulan Formulasi <i>Ius Constituendum</i> Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan LPBBTI dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Pelindungan bagi Pemberi Dana .....	311
<b>PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	366
B.	Saran-Saran .....	369